

# BAB I

## PENDAHULUAN

Bab I Pendahuluan, bagian ini memuat serta memaparkan konteks penelitian yang dilakukan. Pada bagian ini memberikan gambaran fenomena, fakta, atau temuan awal sebagai pendukung dalam penelitian. Dalam bab ini peneliti menjelaskan berdasarkan landasan pemikiran rasional yang didukung oleh teori dan fakta. Pembahasan ini memberikan argumentasi yang kuat berdasarkan pada data, fakta dan kaitannya dengan *gap* topik penelitian yang dapat diteliti lebih dalam. Bagian ini terdiri dari beberapa sub bagian, yaitu: latar belakang, rumusan masalah, tujuan umum, tujuan khusus, manfaat penelitian, dan struktur organisasi tesis.

### 1.1 Latar Belakang Penelitian

Politik selalu saja melahirkan fenomena yang menarik untuk di diskusikan, diperbincangkan bahkan menjadi salah satu bagian dari kajian akademik. Demikian pula fenomena yang dilahirkan politik secara tidak langsung menjadi problematika didalam sistem politik itu sendiri. Populisme menjadi salah satu fenomena yang lahir dari perkembangan politik sejak abad ke 19. Populisme menjadi suatu fenomena yang dapat menarik perhatian akademisi, pengamat politik, politisi, dan masyarakat. Terma ini sangat menarik menjadi bahan diskusi, dialog, hingga menjadi bahan perdebatan. Bagaimana tidak, populisme menjadi sesuatu yang identik dengan klaim sebagai kelompok yang merepresentasikan masyarakat, kelompok yang anti elitis. Hal ini memberikan gambaran populisme dapat dikatakan sebagai cara berpolitik dalam upaya polarisasi emosi masyarakat.

Perkembangan demokrasi modern menimbulkan beberapa fenomena seperti meningkatnya tuntutan demokratis warga negara, warga negara merasa adanya ketidaklengkapan dalam melaksanakan demokrasi sehingga melakukan intervensi kepada pemerintah (kritik), dan meningkatnya kesenjangan dalam ranah sosial dan politik termasuk meningkatnya kasus korupsi, meningkatnya kemiskinan, serta tidak meratanya pendidikan. Sehingga hal ini yang kemudian memicu adanya fenomena populisme (Rosanvallon, 2011). Populisme sebagai anti tesa dari adanya ketimpangan yang terjadi dalam masyarakat. Seperti yang dikatakan Karl Marx bahwa populisme merupakan gejala dari kesusahan yang nyata dan ekspresi dari

sebuah ilusi, populisme lahir dari sebuah krisis, populisme merupakan titik temu dari kekecewaan politik, yang berkaitan dengan representasi yang buruk dan tidak berfungsinya sistem demokrasi, sehingga populisme menjadi persimpangan antara kekecewaan dan kekacauan sosial yang berkaitan dengan kegagalan dalam menyelesaikan masalah sosial saat ini (dalam Suseno, 1999).

Populisme dapat dipahami sebagai bentuk penyederhanaan dan respon yang tidak tepat terhadap masalah-masalah sosial-politik tersebut. Oleh karena itu, memahami populisme tidak hanya sebagai “gaya politik” dengan mereduksi menjadi dimensi demagogis. Memahami populisme juga sebagai “strategi” dalam memperoleh kekuasaan dengan menggunakan cara membangun narasi-narasi politik yang cenderung mempengaruhi psikologi rakyat dengan memperlihatkan ciri kharismatik sebagai pemimpin yang dapat mewakili pesan-pesan rakyat.

Populisme menjadi konsep imajinasi politik, hal ini berkaitan dengan cara pandang dalam melihat dunia politik yang semestinya sebagai jalan kebajikan dilandasi moral dan sebagai jalan persatuan justru menjadi strategi yang mencerminkan tindakan memihak kepada masyarakat tetapi dibalik itu kelompok populis memiliki rencana tertentu dalam misi politiknya. Adanya upaya polarisasi semacam ini dapat menimbulkan ketidakstabilan dalam politik yang berdampak pada kemunduran demokrasi. Populisme menjadi istilah yang mendeskripsikan politik dengan menekankan kepentingan rakyat biasa, baik secara ekonomi maupun secara politik. Narasi yang dibangun menjadi populer karena menawarkan solusi sederhana dan efektif untuk masalah yang kompleks. Tetapi sejauh ini belum ada definisi yang jelas tentang populisme.

Istilah populisme selalu menjadi pembahasan yang belum menemukan titik tengah dalam studi politik Indonesia, mencerminkan konsep populisme digunakan dan diperdebatkan secara luas, serta mendapat respon baik pro dan kontra bagi kalangan ilmuwan (Engesser, 2016; Gidron & Bonikowski, 2013). Populisme diartikan sebagai sebuah ideologi yang membagi masyarakat menjadi dua kelompok yang saling bertentangan. Konsep yang mempertentangkan masyarakat dan kelompok elit yang sedang berkuasa. Awalnya populisme sebagai gerakan kritik terhadap kelompok yang berkuasa, menentang adanya korupsi oleh pemerintah,

pendapat Mudde ini menggambarkan bahwa populisme sebagai ekspresi dari kepentingan rakyat sebagai pemegang kedaulatan dalam negara demokrasi (Mudde, 2004). Sementara Muller (2015) mengkonsepsikan populisme sebagai moral politik yang menginginkan pemerintahan yang bersih sehingga dalam memahami dunia politik menempatkan rakyat sebagai kelompok yang bersih yang berlawanan dengan kelompok minoritas yaitu elit korup (Muller, 2015). Kedua konsep ini memberikan gambaran bahwa populisme politik menjadi gerakan kritis terhadap kondisi pemerintahan dan negara, menjadi sebuah gerakan yang menginginkan perubahan lebih baik dalam perkembangan negara.

Pendapat lain menggambarkan populisme sebagai teknik bicara yang bersifat provokatif sehingga dapat menggerakkan masyarakat untuk bertindak melawan penguasa (elit) (Canovan, 1981; Laclau, 2005). Populisme menjadi sebuah pandangan politik yang menekankan pentingnya kepentingan rakyat secara umum, atau kepentingan kelompok minoritas tertentu, dengan menentang kebijakan elit politik. Pendekatan populis menekankan bahwa rakyat adalah yang paling berhak atas kebijakan politik dan pemerintahan, bahwa elit politik harus mengikuti keinginan rakyat. Populisme menekankan pentingnya menciptakan suara rakyat yang kuat dan menjaga kepentingan rakyat. Beberapa ahli mencoba mengklasifikasikan populisme berdasarkan beberapa faktor, seperti orientasi ekonomi, pendekatan terhadap hak asasi manusia, dan komitmen untuk partisipasi politik. Walaupun demikian, banyak perbedaan pandangan tentang arti sebenarnya dari konsep populisme.

Memahami demokrasi dengan baik, juga perlu untuk memahami populisme dengan baik sebagai salah satu fenomena penyimpangan dalam perkembangan demokrasi (Rosanvallon, 2011). Kehadiran populisme dalam perkembangan demokrasi justru memaksa kita untuk berfikir tentang demokrasi agar lebih baik. Cannovan (1999) mengatakan bahwa populisme berusaha membangun budaya politik yang bersifat dekomposisi demokrasi dengan cara yang samar (tidak jelas) (Cannovan, 1999). Apakah populisme benar-benar mewakili kelompok rakyat yang terdiskriminasi dengan mengancam lawan politik (elit) atau hanya menjadikan narasi membela rakyat itu sebagai strategi untuk mendapatkan dukungan politik. Hal

semacam ini memberikan gambaran bahwa istilah populisme dalam negara demokrasi dapat dikatakan ambigu, bahwa kategorisasi populisme tidak boleh dibuat absolut.

Populisme perlu untuk dilihat dalam beberapa pendekatan. Pertama, populisme merupakan cara memobilisasi massa melalui gerakan-gerakan sosial dan membangun model komunitarian demokrasi. Kedua, populisme menjadi alasan emansipasi dalam menilai demokrasi liberal yang bermasalah. Ketiga, populisme menjadi gaya politik cara politisi dan partai untuk memobilisasi dukungan massa dengan menyebarkan narasi-narasi provokatif. dan Keempat, pendekatan Ideasional melihat populisme sebagai konsepsi politik yang menekankan konflik antara massa yang dipenuhi dengan kebajikan moral dan elit politik yang korup (Mudde & Kaltwasser, 2017). Perkembangan fenomena populisme politik tentunya tidak hanya berkaitan dengan strategi individu saja, tetapi fenomena ini juga tumbuh dan berkembang dalam tubuh partai politik terlebih lagi dinegara yang menganut sistem demokrasi. Populisme dalam partai politik dijadikan sebagai strategi dalam memenangkan elektabilitas partai tersebut.

Partai politik menjadi wadah dalam menjemput dan mewakili aspirasi masyarakat, partai politik menjadi motor dalam menyampaikan pesan-pesan masyarakat dan tentunya memiliki tanggungjawab menjalankan fungsi politiknya (Suprihatini, 2018). Partai politik beroperasi dengan menjaga keseimbangan antara kepentingan umum dan kepentingan individu. Partai politik menawarkan kepada masyarakat berbagai macam solusi untuk masalah yang ada, serta mengambil tindakan yang diperlukan untuk meningkatkan kondisi masyarakat (Irham & Basith, 2018). Melalui partai politik masyarakat dapat berpartisipasi didalam mengembangkan kehidupan yang demokratis serta dapat menjunjung tinggi keadilan, kesejahteraan, kesetaraan, dan kejujuran.

Upaya untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat menjadi tanggungjawab partai politik serta untuk memastikan bahwa Hak Asasi Manusia (HAM) dihormati dan dijunjung tinggi. Partai politik beroperasi dengan menjaga keseimbangan antara kepentingan umum dan kepentingan individu. Hal ini ini dapat diwujudkan jika penyelenggaraan sebuah konsep pendidikan politik

kepada masyarakat berjalan dengan baik serta membangun dan merevitalisasi kualitas Sumber Daya Kader partai yang akan menjadi calon wakil rakyat.

Partai politik merupakan unsur yang cukup sentral dalam perkembangan demokrasi. Perkembangan kenegaraan didunia sangat jarang sekali ditemukan negara demokrasi tanpa lahirnya partai politik (Prihatmoko, 2003). Telah menjadi asumsi yang logis didalam ilmu politik, bahwa suatu negara dikatakan sebagai negara demokrasi bila terdapat partai politik yang keberadaannya merupakan pengakuan pemerintah terhadap hak warga negara untuk berbeda pendapat (Imawan, 1996). Sebuah partai politik yang berkembang dalam negara demokrasi menyentuh prinsip-prinsip yang demokratis dalam mengelola partai sesuai dengan nilai-nilai demokrasi yang dianut (Suprihatini, 2018). Berdasarkan pendapat di atas bahwa partai politik yang demokratis memiliki derajat representatif (bentuk keterwakilan) yang tinggi dihadapan konstituen (para pendukung) politiknya. Hal seperti ini dapat dikaitkan dengan kesesuaian dan konsistensi platform partai dengan aspek-aspek demokratis, serta perwujudan melalui bentuk kebijakan internal partai maupun ketika diimplementasikan dalam bentuk kebijakan publik yang sifatnya lebih luas.

Gambaran idealitas kehadiran partai politik, sangat sejalan dengan cita-cita demokrasi. Partai politik menjadi alat penyalur aspirasi bagi masyarakat. Partai politik juga menjadi tempat dimana lahirnya calon pemimpin yang memiliki kualitas dan kapasitas yang mumpuni dalam melaksanakan kegiatan politik. Dengan demikian, partai politik berperan penting dalam membawa keseimbangan dan stabilitas politik di masyarakat. Dalam proses pemilihan umum partai politik dapat menciptakan kompetisi yang sehat dan mendorong pemimpin untuk bersaing dalam menyampaikan kepentingan rakyat.

Partai politik memungkinkan orang untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum dan menentukan kepemimpinan. Hadirnya partai politik membawa dampak positif bagi masyarakat dalam menciptakan pemahaman yang lebih baik tentang isu-isu politik dan meningkatkan kesadaran politik dimasyarakat. Sehingga partai politik dapat membantu untuk menumbuhkan kesadaran warga negara serta hak-hak dan kewajiban warga negara. Melalui partai politik, masyarakat mendapatkan

akses yang lebih baik terhadap informasi dan perkembangan politik serta dapat terlibat secara langsung dalam proses politik. Dengan demikian, kehadiran partai politik disuatu negara sangat penting untuk membantu masyarakat dalam mencapai tujuan demokrasi.

Permasalahan dalam masyarakat majemuk cukup kompleks, tidak dapat dipungkiri adanya perbedaan pendapat, pemikiran, tujuan, dan keinginan setiap orang. Partai politik hadir sebagai wadah dalam menggerakkan masyarakat, serta mewakili kepentingan masyarakat, sehingga menemukan titik temu atau solusi atas permasalahan yang dihadapi masyarakat (Amal, 1996). Menarik apa yang di katakan oleh John Stuart Mill bahwa politik sebagai kegiatan publik sangat bermanfaat untuk memberikan edukasi yang dapat mempromosikan nilai-nilai, moral, personal, dan intelektual bagi pengembangan individu itu sendiri (dalam Heywood, 2007). Hal ini dilakukan sebagai upaya dan proses panjang untuk menjaga demokrasi dari kemungkinan arus balik, menjaga agar tidak terjadi erosi dan menghindari keruntuhan demokrasi dengan merawat dan memelihara demokrasi serta melengkapi kekurangan, memperkuat kelemahan dan mengorganisasikannya secara berkesinambungan.

Setiap partai politik sangat perlu mengembangkan program yang berorientasi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kualitas kader partai serta bertanggung jawab untuk mengakomodasi kepentingan masyarakat luas dan mengurangi kebingungan akibat populisme politik. Sehingga, partai politik semestinya menekankan pentingnya pendekatan bersifat sistemik dan berfokus pada kompleksitas faktor yang memengaruhi masalah sosial dan politik, dan menghindari retorika yang bias yang dapat menimbulkan konflik dimasyarakat. Perkembangan partai politik saat ini terutama di pengaruhi oleh gaya politik modern, partai politik mengalami kemunduran dalam beberapa hal.

Beberapa fenomena perkembangan partai politik tidak dianggap lagi mewakili kepentingan rakyat. Hal ini disebabkan karena perubahan yang cepat dalam kehidupan politik modern menjadi begitu kompleks atas pengaruh arus globalisasi yang begitu cepat disegala bidang, baik perkembangan dalam skala nasional maupun skala internasional. Partai dinilai tidak mampu menyelesaikan

berbagai masalah, bahkan jika dilihat dalam perkembangan partai politik tidak sedikit masalah yang lahir dari kubu partai politik. Banyak kritikan bagi partai politik saat ini yang dilontarkan misalnya dengan melihat kader-kadernya yang seringkali melakukan korupsi, cenderung lebih mengutamakan kepentingan individu dari pada kepentingan umum, dan mengutamakan kedekatan dengan pusat-pusat kekuasaan. Fenomena semacam ini tidak dapat di pungkiri bahwa partai politik saat ini hanya berorientasi pada misi partai dan strategi pemenangan saja dan telah mengesampingkan tujuan utamanya adalah sebagai penyalur aspirasi masyarakat dan sebagai wadah pendidikan demokrasi masyarakat.

Kegiatan publik tidak lepas dari proses edukasi sebagai sarana menciptakan kegiatan publik yang membawa kebermanfaatan termasuk dalam penyelenggaraan sistem politik harus melalui proses yang baik, hal ini dapat di lakukan melalui pendidikan politik yang diselenggarakan langsung oleh partai politik terhadap masyarakat dan kader-kadernya. Pendidikan politik ini dapat di lakukan melalui dialog, debat, demonstrasi, dan juga konsensus, melalui penekanan seperti ini diharapkan dapat memahami bahwa sistem politik merupakan suatu proses dalam mencapai kesejahteraan dan keadilan. Kebermanfaatan suatu sistem politik berimplikasi pada hubungan dan pengaruh praktik-praktik kegiatan politik salah satunya dengan menumbuhkan kualitas sumber daya manusia dan kader-kader partai yang akan berdampak pada keseimbangan didalam kehidupan perpolitikan.

Perkembangan partai di Indonesia sistem dan proses politik belum berjalan dengan sehat masih jauh dari gambaran ideal diatas. Seringkali ditemui banyaknya fenomena yang timpang dalam tubuh partai politik, misalnya tidak masifnya pendidikan politik terhadap masyarakat dan kader-kader partai, partai politik kerap kali menggunakan strategi yang tidak mencerminkan nilai demokrasi didalam pemilihan umum, karena fungsi partai politik tidak dijalankan dengan baik. Sehingga keberadaan partai politik saat ini hanya sekedar pintu masuk untuk menjadi calon legislatif dan eksekutif serta partai politik hanya berfokus pada kemenangan partai belaka tanpa memperhatikan nilai-nilai ideologi sebagai platform partai. Padahal, ideal partai politik bukan hanya sekedar itu, partai politik menjadi regulator demokrasi, penjaga demokrasi, dan sekaligus menjadi pengawas

Randiawan, 2023

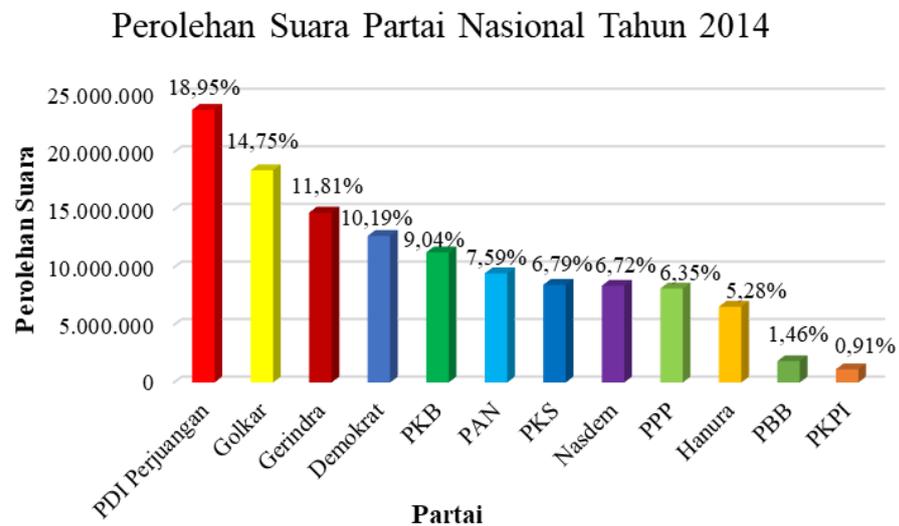
*KONSTRUKSI MAKNA POPULISME POLITIK DAN TINGKAT ELEKTABILITAS PARTAI POLITIK (Studi Fenomenologi Dalam Perspektif Pendidikan Kewarganegaraan)*

Universitas Pendidikan Indonesia | [repository.upi.edu](http://repository.upi.edu) | [perpustakaan.upi.edu](http://perpustakaan.upi.edu)

demokrasi. Dalam beberapa kontestasi pemilihan umum terakhir, nampak terlihat adanya partai-partai yang mendominasi, hal ini tidak bisa kita pungkiri bahwa partai politik fokus pada strategi pemenangan partai dan kader-kadernya tanpa memikirkan bagaimana menciptakan proses pemilu yang sehat dan bermartabat.

Dapat kita lihat elektabilitas partai yang mengikuti kontestasi pemilihan umum pada tahun 2014.

**Gambar 1.1** Data Perolehan Suara Partai Pemilu Tahun 2014



Sumber data: Komisi Pemilihan Umum, 2014.

Data diatas memberikan gambaran bahwa partai yang memiliki suara terbanyak pada pemilihan umum tahun 2014, PDIP masih menjadi partai yang memiliki suara terbanyak 18,95%, Golkar 14,75%, Gerindra 11,81%, Demokrat 10,19%, PKB 9,04%, PAN 7,59%, PKS 6,79%, Nasdem 6,72%, PPP 6,53%, Hanura 5,28%, PBB 1,46 %, dan PKPI 0,91%. Dari perolehan suara nasional partai pada pemilihan umum tahun 2014 ini dapat dilihat bahwa beberapa partai saja yang memiliki suara terbanyak. Artinya, mereka memiliki jatah kursi sesuai dengan perolehan suara partai. Dengan banyaknya kader mereka yang terpilih, yang menjadi pertanyaannya adalah apakah mereka menjalankan pendidikan politik dengan baik kepada kader-kader mereka yang mencalonkan sebagai anggota legislatif. Perbandingan elektabilitas partai politik pada pemilihan umum Tahun 2014 ini tidak jauh berbeda dengan elektabilitas partai politik dalam pemilihan umum Tahun 2019. Sehingga jika melihat data tingkat elektabilitas partai pada

Randiawan, 2023

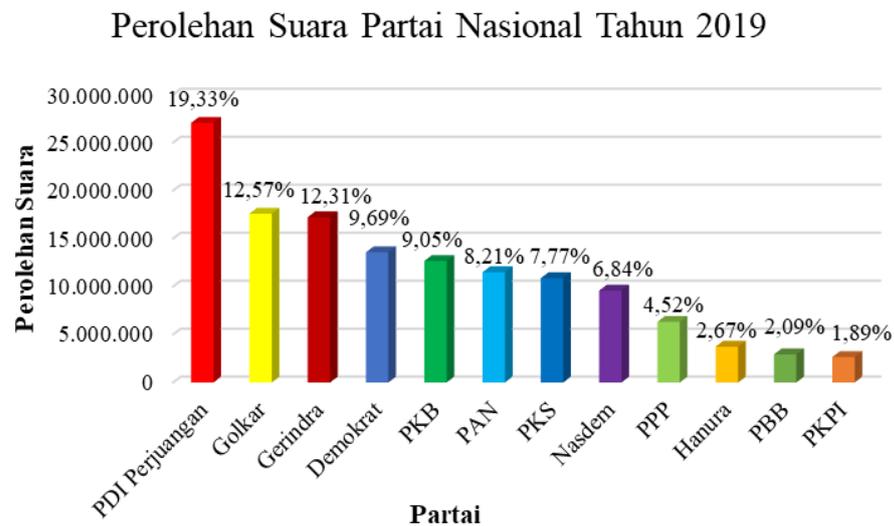
*KONSTRUKSI MAKNA POPULISME POLITIK DAN TINGKAT ELEKTABILITAS PARTAI POLITIK (Studi Fenomenologi Dalam Perspektif Pendidikan Kewarganegaraan)*

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

pemilu tahun 2019 terdapat dominasi partai yang sama apakah ini dipengaruhi oleh besar atau tidaknya partai tersebut atau dipengaruhi oleh strategi politik yang digunakan oleh partai-partai yang mendominasi. Tetapi jika melihat fenomena yang ada terdapat ketimpangan antara partai-partai yang mengikuti kontestasi pemilu.

Dibawah ini data hasil perolehan suara nasional partai politik pada pemilihan umum tahun 2019.

**Gambar 1.2** Data Perolehan Suara Partai Pemilu Tahun 2019



Sumber data: Komisi Pemilihan Umum, 2019.

Dari beberapa pemilu terakhir dapat terlihat bahwa partai politik yang memiliki suara terbanyak masih didapat oleh PDI Perjuangan, Gerindra, Golkar, PKB dan diikuti oleh beberapa partai lainnya. Hal ini yang akan menjadi fokus penelitian melihat fenomena populisme politik yang terjadi pada partai politik dan seberapa besar pengaruh ideologi partai dalam mempengaruhi pandangannya mengenai populisme politik, dan seberapa besar dampak populisme dalam meningkatkan elektabilitas partai. Penelitian ini juga fokus meneliti pada partai yang memiliki spektrum yang berbeda antara partai, seperti Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Secara tidak langsung kedua partai ini memiliki spektrum orientasi partai yang berbeda, yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) sebagai partai Nasionalis dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebagai kategori partai Islamis-Religius. Peneliti ingin melihat bangunan konstruksi makna populisme

Randiawan, 2023

*KONSTRUKSI MAKNA POPULISME POLITIK DAN TINGKAT ELEKTABILITAS PARTAI POLITIK (Studi Fenomenologi Dalam Perspektif Pendidikan Kewarganegaraan)*

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

politik dan pendekatan yang dilakukan oleh kedua partai ini dalam kegiatan partainya, sehingga bangunan makna populisme politik ini dapat berdampak pada peningkatan elektabilitas partai politik.

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) merupakan partai yang cukup tua dalam sejarah perkembangannya, seluruh partai yang di Indonesia memiliki ideologi yang sama yaitu Pancasila sebagai asas dalam setiap partai. Tetapi masing-masing partai yang ada tentunya memiliki pandangan dan orientasi yang berbeda dalam menjalankan sikap politiknya. PDIP sebagai partai yang dinilai berspektrum Nasionalis dalam pandangan dan substansi gerakan politiknya. PDIP pada posisi politiknya merupakan Nasionalisme sosial, yang pada orientasi partainya adalah dapat menentukan nasib sendiri dengan berdasarkan pada kedaulatan rakyat serta kesetaraan sosial hal ini lebih menganjurkan pada supremasi kedaulatan (Adams, 2007). Sementara, Partai Keadilan Sejahtera dinilai sebagai partai yang berhaluan kanan dalam gerak dan sikap politiknya. Menurut Liddle (2003) bahwa Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebagai partai yang mewakili kelompok islamis yang secara notabene tidak berakar pada kekuatan organisasi modernis (Liddle, 2003). Garis ideologi politik PKS bisa dilihat dari dua sisi yaitu adanya perpaduan antara Islam modernis dengan fundamentalisme. Berdasarkan hal tersebut PKS dapat dikatakan sebagai partai yang fundamentalisme garis lunak dalam berpolitik (Konservatisme Sosial) dengan mempertahankan nilai-nilai tradisional dimasyarakat (Aminuddin, 2010).

Berbagai fenomena yang lahir dalam perkembangan partai politik, salah satunya adalah Fenomena populisme politik selalu menjadi momok yang diperbincangkan bahkan diperdebatkan pada kalangan akademisi, politisi, dan masyarakat. Populisme menjadi fenomena politik kontemporer saat ini, berkembang dan menjadi strategi yang dilakukan oleh para kalangan kelompok populis, kelompok populis ini banyak muncul dari kalangan politisi. Tetapi kalangan populis ini cenderung dapat menyalahgunakan kekuasaan untuk keuntungan politik mereka, dan menggunakan retorika yang berlebihan serta konfrontatif. Fenomena ini telah menjadi perhatian penting bagi perkembangan

politik di Indonesia sejak lama, tetapi berkembang dengan cepat pada tahun-tahun terakhir.

Populisme hanya dijadikan sebagai alat politik dalam meraih kekuasaan dan sebagai cara menarik perhatian masyarakat untuk mendapat dukungan, tetapi para kaum populis ini setelah meraih kekuasaan tersebut justru mengabaikan kepentingan rakyat dan mengambil keuntungan dari masalah-masalah tertentu. Oleh karena itu, populisme politik berfokus pada rakyat dan partai politik yang berusaha mempromosikan nilai-nilai konservatif dan tradisional, serta menjadi penyelamat rakyat dari masalah-masalah yang dihadapi. Partai politik menjadikan populisme sebagai cara dan strategi dalam meraih perhatian rakyat secara umum.

Populisme ialah juga disebut sebagai istilah pertempuran politik (*kampfbegriff* politik) untuk mengecam lawan politik (Kaltwasser, 2017). Kondisi seperti ini dapat menciptakan situasi, sebagian besar masyarakat menjadi terbelah karena perbedaan pandangan politik. Memainkan isu populisme menjadi hal yang seringkali digunakan oleh partai atau kader partai karena dinilai sebagai cara yang paling efektif dalam memenangkan kontes pemilihan. Dampak dari populisme politik dapat meningkatkan ketegangan antar kelompok sosial dan etnik, yang dapat menyebabkan ketidakstabilan politik.

Berkembangnya berbagai masalah dalam politik, dapat menjadi gangguan dalam proses perkembangan demokrasi. Perpolitikan saat ini yang lebih cenderung hanya menekankan aspek popularitas, bukan lagi kualitas yang menjadi pertimbangan utama. Secara tidak langsung fenomena seperti ini akan berdampak pada masa depan bangsa dan negara. Sehingga partai politik kerap kali merekrut tokoh yang telah memiliki popularitas secara individu dan dijadikan sebagai calon dalam pemilihan. Popularitas saja tidak cukup untuk menjadi modal dalam mengatasi permasalahan dimasyarakat, tetapi perlu adanya kualitas sebagai modal utama dalam mengatasi masalah kebangsaan dan didukung dengan strategi yang sehat. Perubahan orientasi gerak politik kedalam ranah popularitas, Tidak terlepas dari perkembangan zaman teknologi dan informasi, sehingga dapat mengubah kecenderungan dalam masyarakat.

Melvin DeFleur (2009) mengatakan bahwa perkembangan teknologi dan informasi menjadikan media yang digunakan sebagai alat politik sehingga mereka mendapatkan perhatian dari publik (dalam Danial, 2009). Indikasi euphoria yang menjadi asumsi bahwa gerak politik saat ini telah miskin kepercayaan dari masyarakat. Tidak lain bahwa disebabkan adanya ketidaksesuaian antara janji politik para politikus dengan kenyataan yang terjadi dalam implementasi kebijakan saat mereka terpilih menjalankan pemerintahan. Kesenjangan yang terjadi dalam proses politik sehingga masyarakat kehilangan kepercayaan kepada mereka. Dapat dilihat dari kebijakan yang masih mendiskreditkan kepentingan rakyat, tidak hanya itu terjadi penyelewengan kekuasaan masih terjadi sehingga membuat rakyat semakin tidak percaya kepada mereka. Selain permasalahan yang telah dipaparkan diatas adanya fenomena populisme yang berkembang pada partai politik dan menjadikan isu populisme sebagai strategi politiknya dapat menimbulkan permasalahan tersendiri pada perkembangan perpolitikan di Indonesia.

Perlu adanya penelitian khusus terkait fenomena populisme politik dan tingkat elektabilitas partai politik. Tetapi peneliti hanya fokus pada partai yang memiliki spektrum politik yang berbeda. Seperti Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sebagai partai yang berspektrum partai nasionalis dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebagai partai yang berspektrum partai islamis. Kedua partai ini menurut peneliti sebagai partai yang memiliki ciri khas dan strategi politik yang khas sesuai dengan pandangan partai masing-masing. Tetapi peneliti memfokuskan penelitian ini pada Dewan Pengurus Daerah PDI Perjuangan Provinsi Jawa Barat dan Dewan Pengurus Wilayah PKS Provinsi Jawa Barat. Dengan alasan bahwa banyaknya fenomena populisme politik yang terjadi di daerah. Sebagai upaya akademisi menjelaskan bagaimana populisme politik berkembang pada partai politik. Penelitian ini juga dianggap perlu dalam mengkaji pendekatan populisme politik yang dilakukan oleh partai politik sebagai upaya dalam menjalankan strategi politik. Tentu saja, orientasi dari variabel penelitian ini ditinjau dari sudut pandang perspektif pendidikan kewarganegaraan, yang mendorong upaya untuk memperkuat substansi dan gagasan instruksi pendidikan kewarganegaraan. Dari latar belakang yang telah dipaparkan maka peneliti

mengangkat judul penelitian mengenai “Konstruksi Makna Populisme Politik Dan Tingkat Elektabilitas Partai Politik” Penelitian ini merupakan studi Fenomenologi dengan menggunakan Perspektif Pendidikan Kewarganegaraan.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Populisme politik menjadi salah satu faktor penunjang dalam peningkatan elektabilitas partai politik. Populisme dapat berdampak positif atau berdampak negatif pada perkembangan demokrasi di Indonesia. Oleh karena itu, maka arah penelitian ini. Pertama, kita akan mempelajari dan menganalisis secara mendalam makna populisme politik yang dikonstruksi dari pandangan partai politik dan dikaji melalui perspektif pendidikan kewarganegaraan, dan membuat konstruksi makna ini secara objektif dan komprehensif mengingat belum ada makna populisme politik yang jelas dalam kajian akademis. Kedua, menggali dan menganalisis secara mendalam, realitas cara Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Dewan Pengurus Wilayah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Provinsi Jawa Barat melakukan pendekatan Populisme politik. Ketiga, menggali dan menganalisis strategi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Provinsi Jawa Barat yang berimpilasi pada peningkatan elektabilitas partai politik dalam pemilihan umum. Keempat, membentuk makna populisme politik dari perspektif Pendidikan kewarganegaraan. Realitas dan masalah ini diselidiki dan diperiksa melalui penelitian fenomenologis dari sudut pandang pendidikan kewarganegaraan. Untuk membantu peneliti melaksanakan dan menyelesaikan penelitian ini, maka uraian masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana makna populisme politik yang dibangun oleh Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Dewan Pengurus Wilayah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Provinsi Jawa Barat?
2. Bagaimana bentuk pendekatan populisme politik yang dilakukan oleh Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Dewan Pengurus Wilayah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Provinsi Jawa Barat?
3. Bagaimana Strategi Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Dewan Pengurus Wilayah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Provinsi Jawa Barat dalam meningkatkan elektabilitas partai?

Randiawan, 2023

*KONSTRUKSI MAKNA POPULISME POLITIK DAN TINGKAT ELEKTABILITAS PARTAI POLITIK (Studi Fenomenologi Dalam Perspektif Pendidikan Kewarganegaraan)*

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

4. Mengapa Pendidikan Kewarganegaraan perlu mengkaji fenomena populisme politik.

### **1.3 Tujuan Penelitian**

#### **1.3.1 Tujuan Umum**

Tujuan penelitian ini untuk memperbaiki dan mengevaluasi konsep akan menjadi orientasi pada riset ini dapat memberikan kontribusi ilmiah bagi partai politik dan kader-kadernya, serta praksis kajian bagi para akademisi yang fokus pada kajian politik, memperkaya dan mengembangkan kajian ilmiah mengenai realitas populisme politik terhadap tingkat elektabilitas partai politik dalam rangka merespon berbagai problematika perpolitikan yang semakin dinamis dan kompleks, melalui perspektif keilmuan Pendidikan kewarganegaraan. Serta dapat menemukan definisi khusus populisme politik yang dilihat dari sudut pandang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Keadilan Sejahtera yang kemudian dikonstruksi dengan menggunakan perspektif pendidikan kewarganegaraan.

#### **1.3.2 Tujuan Khusus**

Dalam konteks tujuan khusus, penelitian ini mengarahkan pada pengetahuan jawaban objektif dan ilmiah dari rumusan masalah yang telah diuraikan, dengan kualifikasi secara menyeluruh dan lebih jelas sebagai berikut:

1. Diketuainya konstruksi makna populisme politik yang dibangun oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
  - a. Terkonstruksinya makna populisme politik dari sudut pandang ideologi partai yang berbeda.
  - b. Perspektif partai tentang populisme politik sesuai dengan pandangan ideologi partai memperkaya makna populisme politik.
  - c. Spektrum ideologi partai yang berbeda dapat mempengaruhi bangunan makna populisme politik yang berbeda.
2. Diketuainya realitas pendekatan populisme politik yang dilakukan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Provinsi Jawa Barat.

- a. Upaya atau program yang dilakukan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang berorientasi pada popularitas partai.
  - b. Realitas partai politik dalam melakukan pendekatan populisme politik secara langsung dimasyarakat.
  - c. Persepsi pengurus sekaligus kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Keadilan Sejahtera Provinsi Jawa Barat mengenai pendekatan populisme politik yang dilakukan oleh partai.
3. Diketuainya Strategi Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Dewan Pengurus Wilayah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Provinsi Jawa Barat dalam Meningkatkan Elektabilitas partai.
    - a. Cara dan langkah taktis partai mewujudkan Visi dan Misinya.
    - b. Ketertarikan serta nilai jual partai kepada masyarakat.
    - c. Alasan kader bergabung dengan partai dan peluang kemenangan mereka dari partai itu.
  4. Diketuainya Perspektif Pendidikan Kewarganegaraan dalam Mengkaji Populisme Politik.
    - a. Memakai kecamata Pendidikan Kewarganegaraan dalam melihat fenomena populisme politik.
    - b. Perlu untuk melakukan atau memakai pendekatan Pendidikan Kewarganegaraan dalam melihat fenomena populisme politik.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Manfaat dari penelitian ini yaitu merekonstruksi sebuah makna populisme politik secara komprehensif sebagai upaya untuk menambah perspektif baru tentang populisme politik sebuah manfaat dari penelitian ini. Dalam mendefinisikan populisme politik, harus melalui konstruksi upaya ilmiah. Sehingga sifatnya lebih subjektif dan lebih menyeluruh, pandangan ini juga merupakan upaya logis dalam membangun hipotesis, ide, dan penemuan asli sehubungan dengan pentingnya dukungan sosial, meskipun spekulasi terkait telah ditemukan, tentu saja

konsekuensi dari penelitian ini tentang pentingnya kerja sama dapat digunakan sebagai sumber. Adapun manfaat teoritis secara khusus sebagai berikut:

- a. Terkonstruksinya makna populisme politik secara komprehensif.
- b. Tersusunya kajian ilmiah mengenai penguatan dalam merespon fenomena populisme politik, melalui konstruksi makna populisme politik secara komprehensif.
- c. Terkonstruksinya kajian ilmiah tentang fenomena populisme politik dalam sudut pandang Pendidikan kewarganegaraan.
- d. Dilaksanakannya pendekatan dan strategi populisme partai kepada masyarakat sebagai upaya membangun hubungan emosional partai dan konstituen.

#### **1.4.2 Manfaat Segi Kebijakan**

Manfaat yang dapat menjadi referensi dari segi kebijakan dengan adanya fenomena populisme politik tersebut, tentunya akan sangat dibutuhkan penelitian yang lebih dalam sesuai dengan cita-cita dan realitas yang ada. Terutama dalam menemukan makna objektif dari populisme politik dan tingkat elektabilitas partai politik. Tentunya manfaat dari penelitian ini dapat memberikan evaluasi dan analisis dari kebijakan dan suatu hal yang dilakukan oleh partai politik melalui langkah ilmiah, yang akan mengarah pada konstruksi makna populisme politik secara objektif dan komprehensif. Ketika melihat realitas dan masalah dengan keunggulan partai dari segi suara dan mendominasi pada kursi parlemen perlu adanya penelitian khusus seperti ini untuk menjadi pedoman bagi partai politik dan kader partai sehingga tingkat elektabilitas partai yang tinggi diimbangi dengan kualitas kader yang mumpuni. Hal ini menjadi usaha untuk menanggulangi masalah tersebut, serta penelitian ini mengarah pada:

- a. Memberi informasi secara empiris melalui cara yang ilmiah kepada pengurus partai, kalangan akademisi, dan masyarakat Indonesia mengenai makna objektif dan komprehensif makna populisme politik.
- b. Dapat memberikan gambaran fenomena populisme politik kepada masyarakat secara umum tentang kebenaran dan isu-isu populisme politik dapat berdampak negatif dan bisa juga berdampak positif.

- c. Mewujudkan *citizenship education* sebagai jenis kegiatan peningkatan kualitas kader partai yang berkompetisi pada kontestasi politik, sehingga partai mementingkan kualitas kadernya dibanding popularitas.
- d. Mengubah paradigma partai dalam merespon fenomena populisme politik dapat berdampak buruk bagi kesehatan demokrasi di Indonesia.

### 1.4.3 Manfaat Segi Praktik

Penelitian ini dapat menjadi acuan bagi pelaku politik (politisi) atau masyarakat secara umum dalam melihat fenomena populisme politik yang terjadi, sehingga mereka tidak mempraktikkan strategi-strategi populisme yang negatif dalam proses politik.

- a. Diketuainya konstruksi makna populisme politik yang dibangun oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
- b. Diketuainya pendekatan populisme politik yang dilakukan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Provinsi Jawa Barat.
- c. Diketuainya Strategi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam meningkatkan Elektabilitas Partai pada Pemilihan Umum.
- d. Diketuainya Perspektif Pendidikan kewarganegaraan dalam mengkaji populisme politik dan menjadi pedoman bagi partai politik untuk melaksanakan proses-proses politik yang sehat dan damai.
- e. Penelitian ini menjadi salah satu solusi dalam memecahkan masalah fenomena populisme politik yang negatif di Indonesia.

### 1.4.4 Manfaat Segi Aksi Sosial

Penelitian ini bisa dikatakan sebagai alat untuk memberikan nasihat, pencerahan, serta pengalaman bagi peneliti, pelaku politik, akademisi, dan masyarakat.

- a. Penelitian dapat diakses oleh orang-orang yang ingin memperdalam kajian isu-isu politik.

- b. Penelitian ini juga menjadi bahan bacaan dan referensi bagi lembaga penyelenggara pemilihan umum seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Partai Politik, Politisi, Akademisi dan Masyarakat.

### 1.5 Struktur Tesis Penelitian

Peneliti dalam membuat sebuah struktur tesis penelitian ini berdasarkan Peraturan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia No. 7867/UN40/HK/2019 Tentang Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah Universitas Pendidikan Indonesia (2021), Sistematika tesis sebagai karya ilmiah dijelaskan sebagai berikut:

- a. Bab I Pendahuluan, bagian ini memuat serta memaparkan konteks penelitian yang dilakukan. Pada bagian ini memberikan gambaran fenomena, fakta, atau temuan awal sebagai pendukung dalam penelitian. Dalam bab ini peneliti menjelaskan berdasarkan landasan pemikiran rasional yang didukung oleh fakta. Sehingga memberikan argumentasi yang kuat berdasarkan pada data, fakta dan kaitannya dengan *gap* topik penelitian yang dapat diteliti lebih dalam. Bagian ini terdiri dari beberapa sub bagian, yaitu: latar belakang, rumusan masalah, tujuan umum, tujuan khusus, manfaat penelitian, dan struktur organisasi tesis.
- b. Bab II Kajian Pustaka, bagian ini memuat sebuah gambaran mulai dari perdebatan teori, konsep, novelty penelitian dan temuan penelitian sebelumnya sebagai rujukan dalam menganalisis, mengkonfirmasi, dan merefleksi temuan dari hasil penelitian yang terkait. Berdasarkan variabel penelitian tesis ini, peneliti menyusun gambaran teori dan konsep konstruksi makna, teori elit, teori partai politik, teori demokrasi, teori komunikasi politik, aliran filsafat politik, populisme politik, partai politik, elektabilitas partai, pendidikan kewarganegaraan.
- c. Bab III Metode Penelitian, bagian ini menjelaskan isi-isi metode penelitian, pendekatan penelitian, menjelaskan lokasi dan subjek penelitian, serta analisis data yang dilakukan dengan mengacu pada pedoman penelitian yang dikaitkan dengan judul penelitian dalam tesis secara terperinci sesuai dengan kaidah-kaidah penelitian.
- d. Bab IV Temuan dan Pembahasan, bagian ini peneliti akan menyajikan deskripsi hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian, baik yang diperoleh melalui

observasi, wawancara, dan studi dokumentasi mengenai konstruksi makna populisme politik dan tingkat elektabilitas partai politik dalam perspektif pendidikan kewarganegaraan. Penyajian data temuan dan pembahasan ini peneliti peroleh dari berbagai aktivitas penelitian yang telah dilakukan secara disiplin, sistematis, dan dilakukan dengan kehati-hatian pada perencanaan maupun proses pengambilan data dan informasi.

- e. Bab V Simpulan, Implikasi, dan Rekomendasi, bagian ini peneliti menguraikan kesimpulan hasil penelitian terkait Konstruksi Makna Populisme Politik Dan Tingkat Elektabilitas Partai Politik dalam Pespektif Pendidikan kewarganegaraan dalam dua bagian simpulan, yaitu kesimpulan umum dan kesimpulan khusus. Pada kesimpulan umum dideskripsikan hasil penelitian secara general sehingga tidak disusun secara kategorisasi sebagaimana pada rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini. Sedangkan pada kesimpulan khusus akan dideskripsikan hasil penelitian secara spesifik dengan adanya kategorisasi yang sesuai dengan rumusan masalah penelitian yang angkat dalam penelitian ini.
- f. Daftar Pustaka, bagian ini merupakan kumpulan rujukan referensi dalam penyusunan tesis ini.